



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
07/PRT/M/2018 TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA DI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

RIZKI KURNIAWAN
NIM:11627104227

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/PRT/M/2018 TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI”** yang ditulis oleh:

Nama : RIZKI KURNIAWAN
 NIM : 11627104227
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 28 Mei 2021
 Pembimbing Skripsi

Dr. Abu Samah, MH
 NIK :130112055

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/PRT/M/2018 TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI"* yang ditulis oleh :

Nama : **RIZKI KURNIAWAN**
 NIM : 11627104227
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2021

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Nurhidayat, SH., MH

Penguji I
Muslim, S.Ag, SH., MH

Penguji II
Joni Alizon, SH., MH

[Handwritten signatures of the examiners]

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfikri, M.Ag

NIP. 196400062005011005

ABSTRAK

Rizki Kurniawan,(2021): “Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai”.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah merupakan fasilitas pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menyediakan rumah yang layak huni. Permasalahan dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) mengenai ketepatan sasaran dan pengawasan dalam pelaksanaan program.

Dari latar belakang permasalahan diatas, perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di kecamatan sungai Sembilan kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan apa kendala dari Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dan teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, wawancara. Dengan maksud tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian identifikasi masalah, dan menuju kepada penyelesaian masalah.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Sungai Sembilan sudah berjalan dengan baik, dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima bantuan. Namun penetapan penerima bantuan belum merata, sehingga masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan sedangkan rumah tempat tinggalnya sudah banyak kerusakan dan layak untuk di bantu. Bahkan ada satu



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kelurahan yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali dikarenakan jarak dan ketersediaan bahan bangunan. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya yaitu, kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam hal dinas perumahan dan permukiman dalam pembangunan rumah, sehingga terdapat rumah yang telah mendapat bantuan namun belum ada perbaikan seperti yang diharapkan dan juga bahan bangunan yang digunakan tidak sesuai dengan yang di sarankan oleh pemerintah, ketersediaan sarana dan prasana, Kendala selanjutnya adalah jarak dengan infrastruktur jalan yang kurang memadai dan penyediaan bahan bangunan yang jauh dari lokasi penetapan bantuan, kemudian cuaca yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian bangunan.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat, kasih sayang, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu pengetahuan. Sholawat beriring salam tidak lupa penulis kirimkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti saat sekarang ini.

Atas rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai”. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Jemono dan Ibunda Marsiah, Kakanda Nelly susanti dan Abangda Eko supriadi dan Joko susanto. Beserta keluarga

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu berkorban baik jiwa dan raga, moril dan materil untuk selalu mencintai dan memperjuangkan adinda agar selalu menjadi orang yang berguna bagi Agama, Keluarga, Bangsa dan Negara serta selalu memberikan nasehat dan motivasi agar selalu sukses dunia terlebih akhirat.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I,II, dan III
4. Bapak Firdaus, SH.,MH selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
5. Bapak Asril, S.Hi. MH selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan dan nasehat akademis dan moril.
6. Bapak Abu Samah selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritikan kepada adinda sehingga adinda dapat menyelesaikannya skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu dosen serta semua civitas akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan waktu untuk adinda selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2016 terkhusus Ilmu Hukum B serta teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelurahan Lubuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gaung yang telah mewarnai cerita masa-masa perkuliahan yang menjadi pelajaran hidup bagi peneliti.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah segala kemuliaan dan kebesaran, serta selalu berserah diri kepada-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat membantu bagi yang membutuhkan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Mei 2021
Penulis

Rizki kurniawan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hal ini merupakan bagian dari karya tulis yang telah dipublikasikan dan menyebutkan sumber:
 1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© an-cia a ilik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	21
A. Kota Dumai	21
B. Kecamatan Sungai Sembilan	22
C. Kondisi Sosial Kecamatan Sungai Sembilan	25
D. Kondisi Ekonomi Kecamatan Sungai Sembilan	27
E. Pemerintahan Kecamatan Sungai Sembilan	27
BAB III TINJAUAN TEORI	30
A. Negara Hukum Kesejahteraan (<i>welfare state</i>)	30
B. Kebijakan Publik	34
C. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	40
D. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	43



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai	48
B. Kendala Dari Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai	54

BAB V PENUTUP 58

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

- Hal ini dilindungi Undang-Undang
1. Larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	15
Tabel II. 1	Luas wilayah jumlah dan kepadatan penduduk	25
Tabel II.2	Rincian banyak kelurahan menurut klasifikasi kelurahan di kecamatan sungai Sembilan	28
Tabel II.3	Banyaknya Rukun Tetangga Di Kecamatan Sungai Sembilan Menurut Kelurahan	28
Tabel II.4	Jumlah Lembaga Masyarakat Kelurahan Di Kecamatan Sungai Sembilan	29
Tabel II.5	Personil Keamanan Menurut Kelurahan Di Kecamatan Sungai Sembilan	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan *Rechstaat* tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat, sebagaimana dimaksudkan dalam artian *Welfare state*, akan tetapi lebih dari itu yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai manifestasinya pemerintah sejak kurun waktu 25 tahun hingga sekarang tidak saja menyelenggarakan pemerintah secara rutin, akan tetapi juga melaksanakan pembangunan secara konseptual dan konsisten melalui tahapan-tahapan.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dapat dijumpai mengenai sistem jaminan sosial pada pasal 34 ayat 2 yang mengatakan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945 juga disebutkan anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap,

¹Widjaja, *Pemerintah Desa Dan Administrasi Desa*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002. Hlm. 1



rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat miskin dibangun dengan tidak memperhatikan kriteria fisik rumah yang layak huni.

Secara umum, kemiskinan disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan mengakibatkan ketidak mampuan dalam mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran di suatu negara ini, yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan serta permasalahan sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan yang kurang mendukung ekonomi rakyat.²

Kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: *“kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,*

² Sri Edi Suwarsono, *Sekitar Kemiskinan Dan Keadilan*, (Jakarta: UII Press, 2007), Hlm.



spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Dalam konteks Indonesia, cita-cita dan tujuan negara adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Dengan demikian kebijakan publik adalah seluruh prasana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Atau dengan kata lain kebijakan publik adalah suatu “manajemen pencapaian tujuan nasional”.³

Setiap kebijaksanaan atau program haruslah dilaksanakan dalam waktu yang tepat, serta dijaga sehingga tidak terjadi ketidاكلancaran dalam pelaksanaan itu, yang oleh Michall C. Musheno disebut “*implementation lag*”, yaitu waktu yang berlangsung antara “*policy adoption*” dan “*actual program implementation*”. Suatu kebijaksanaan yang telah diterima dan disahkan (*adopted*), tidaklah ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Memang ada beberapa kebijaksanaan pemerintah yang tiada perlu dilakukan kegiatan pelaksanaannya, yaitu kebijaksanaan yang disebut “*self executing policy*”. Kebijaksanaan ini berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan. Sebagai contoh adalah kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan untuk mengakui kemerdekaan negara lain. Kebijaksanaan ini mempunyai sifatnya yang “*clear-cut*” dan “*one time action*”. Pelaksanaan kebijaksanaan itu haruslah berhasil. Bahkan tidak hanya pelaksanaannya yang harus berhasil, tetapi juga tujuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Luthfi J. Kurniawan, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Malang: Setara Press, 2107.
Hlm.16



(goal) yang terkandung dalam kebijaksanaan itu haruslah tercapai, yaitu terpenuhinya kepentingan masyarakat (*public interest*).⁴

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat mendesak untuk ditangani. Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang juga mempunyai peran yang sangat strategis.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28 H dijelaskan bahwa tempat tinggal dan lingkungan yang layak adalah hak bagi setiap orang. Karena setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Saat ini jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia masih cukup besar, yang menyebabkan banyak tempat tinggal warga yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni.⁵

Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui program rehabilitas rumah yang tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada

⁴ Suratman, dkk, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2019. Cet-1, Hlm. 222

⁵ Ida Farida, Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS), *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Volume 7 Nomor 1 April 2020, Hlm. 36



masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar taraf kehidupan serta kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi salah satunya dalam pemenuhan kebutuhan dasar papan/perumahan masyarakat.

Pelaksanaan program ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitasi pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan BSPS membutuhkan ketertiban masyarakat untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menyediakan rumah layak huni.

Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSPS) yang kegiatan ini dilaksanakan pada provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Salah satu daerah pelaksanaan program BSPS ini yaitu Kota Dumai Provinsi Riau. Kota Dumai telah menjalankan Program BSPS tersebut guna meningkatkan kualitas rumah layak huni.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat dengan BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru, rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni. Bantuan BSPS berupa uang dan barang yang diberikan kepada penerima BSPS. Dimana uang ini akan dipergunakan untuk membeli bahan bangunan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membayar upah kerja, sedangkan yang berbentuk barang berupa PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRs.

Penerima bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan MBR yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga
- b. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah
- c. Belum memiliki rumah atau memiliki rumah dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni
- d. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan
- e. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi
- f. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya dalam bentuk uang dilakukan melalui bank/pos penyalur ke rekening penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Baru Dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Di Kota Dumai tahun 2018 bahwa, bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah



masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni.

Pembangunan rumah swadaya merupakan program pemerintah untuk membantu warga miskin agar memiliki rumah yang layak huni. Program ini menjadi salah satu program unggulan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 3 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat. Pembangunan perumahan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk menyebabkan tidak semua masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya akan perumahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat dan golongan ekonomi yang tidak mampu mengakses pembangunan perumahan, mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut tanpa mempertimbangkan syarat kesehatan dan kelayakan rumah sebagai tempat tinggal.

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga, tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Demikian juga persoalan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan.

Untuk terlaksananya pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mendorong berjalannya kebijakan-kebijakan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan dalam bentuk musyawarah, aspirasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang ada.⁶

Bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah kota Dumai, sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program pembangunan layak huni telah banyak dikembangkan oleh pemerintah meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan

⁶ Andi Pangerang Moenta Dan Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018. Hlm. 167



rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari harapan.

Program-program pengentasan kemiskinan ini dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat yang paling utama atau kebutuhan primernya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka pemerintah saat ini juga sudah memulai program bantuan stimulan pembangunan rumah untuk masyarakat miskin. Sebagaimana diketahui bahwa rumah merupakan kebutuhan primer setiap orang dan merupakan tempat yang memiliki fungsi yang multi dimensional. Kelayakan suatu rumah akan sangat menentukan bagaimana seorang individu menjalankan kehidupan sosialnya setiap hari. Namun untuk mewujudkan suatu rumah yang sesuai dengan standar kelayakan bukanlah suatu proses yang mudah bagi masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Program Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah bagi penduduk yang berpenghasilan rendah. Upaya pembangunan bantuan rumah tersebut diharapkan akan mampu menekan angka kemiskinan dibidang infrastruktur karena salah satu indikator yang digunakan untuk mengkategorikan masyarakat berpenghasilan rendah adalah terkait dengan kondisi perumahan atau tempat tinggal keluarga masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Namun dalam pelaksanaanya, berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di dalamnya mengakibatkan program ini tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlaksana sesuai dengan pedoman atau mekanisme. Penulis menemukan fenomena-fenomena dalam pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya salah satunya, belum meratanya penerima bantuan, belum tepatnya sasaran didalam pelaksanaan bantuan dan kurangnya pengawasan dari dinas perumahan. Dengan demikian pelaksanaan bantuan dinilai tidak tepat guna. Di Kelurahan Batu Tritip misalnya, program bantuan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tidak masuk di daerah mereka sehingga masyarakat mengeluhkan banyak peserta yang seharusnya layak mendapatkan program ini tetapi sama sekali tidak mendapatkan program bantuan ini dikarenakan terkendala beberapa faktor yang menghambat program bantuan tersebut sehingga tidak masuk ke daerah mereka. Begitu pula di Kelurahan Lubuk Gaung, banyak masyarakat yang mempersoalkan peserta yang dinilai masuk dalam kriteria penerima bantuan rumah namun tidak terdata dalam peserta penerima bantuan rumah tersebut.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, peneliti merasa bahwa kebijakan pelaksanaan bantuan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai belum sepenuhnya berhasil. Untuk itu peneliti berharap dengan diadakannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta informasi bagi instansi terkait dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai”**.



B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta mudah dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan kendala dari pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di kecamatan sungai Sembilan kota Dumai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ?
2. Apa Kendala dari Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H. c. i. a. m. i. k. I. N. S. u. s. k. a. R. i. a. u. S. t. a. r. I. s. l. a. m. I. n. i. v. e. r. s. i. t. y. o. f. S. e. l. a. n. S. y. a. r. i. f. K. a. s. i. m. R. i. a. u.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.
- b. Untuk Mengetahui Kendala dari Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di kecamatan sungai Sembilan kota dumai.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis, dan secara praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sta Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

b. Secara praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana program bantuan stimulan perumahan swadaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- 3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya untuk Masyarakat berpenghasilan rendah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:



1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu metode penelitian hukum yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, dan adanya kejanggalan antara peraturan dan penegakkannya di lapangan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, Camat Sungai Sembilan, Lurah Sungai Sembilan dan Masyarakat yang menerima bantuan stimulan perumahan swadaya untuk masyarakat miskin di Kecamatan Sungai Sembilan.

Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di kecamatan sungai sembilan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2018, Cet.10. Hlm. 105



Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁸

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi terlampau besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.⁹

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase sample	Metode Sampel
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai	30	5	16,7%	Purposive Sampling
2	Sekretaris Camat Sungai Sembilan	1	1	100%	Total Sampling
3	Koordinator BPS Kota Dumai	1	1	100%	Total Sampling
4	Kepala Kelurahan di Kecamatan Sungai Sembilan	5	1	10,5%	Purposive Sampling
Jumlah		37	8		

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003, Cet. Ke-5, Hlm. 121

⁹ *Ibid*, Hlm. 123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹⁰ Zainudin Ali, *Op Cit*, Hlm. 106

Sumber data dalam penelitian ini terdapat tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:¹⁰

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan lain-lain.



5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai dasar cara untuk mendapatkan data-data yang tepat dan lengkap. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:¹¹

a. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis akan melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subyek dan obyek kajian.

b. Wawancara

Wawancara atau Tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian langsung kepada pihak yang bersangkutan.

Metode ini ditujukan kepada sampel dan merupakan metode yang paling penting dan utama bagi penelitian ini untuk mendapatkan informasi langsung dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai mekanisme bantuan stimulan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kecamatan sungai Sembilan kota Dumai.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 136



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin

berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, laporan, notulen rapat dan dokumentasi lainnya. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang berhubungan dengan gambaran umum dari program stimulan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kecamatan sungai Sembilan kota Dumai atau obyek yang diteliti dan berupa dokumentasi lainnya.

E. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang memuat uraian dan bahasa tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:



BAB I: PENDAHULUAN

Bab yang memuat uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, selanjutnya akan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian terdiri dari: Geografis dan Demografis, Pendidikan, Agama, Sosial Ekonomi dan Pekerjaan di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi permasalahan yang meliputi mekanisme, dan Kendala dari Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Baru Dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang memuat uraian bagaimana mekanisme bantuan stimulan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Baru

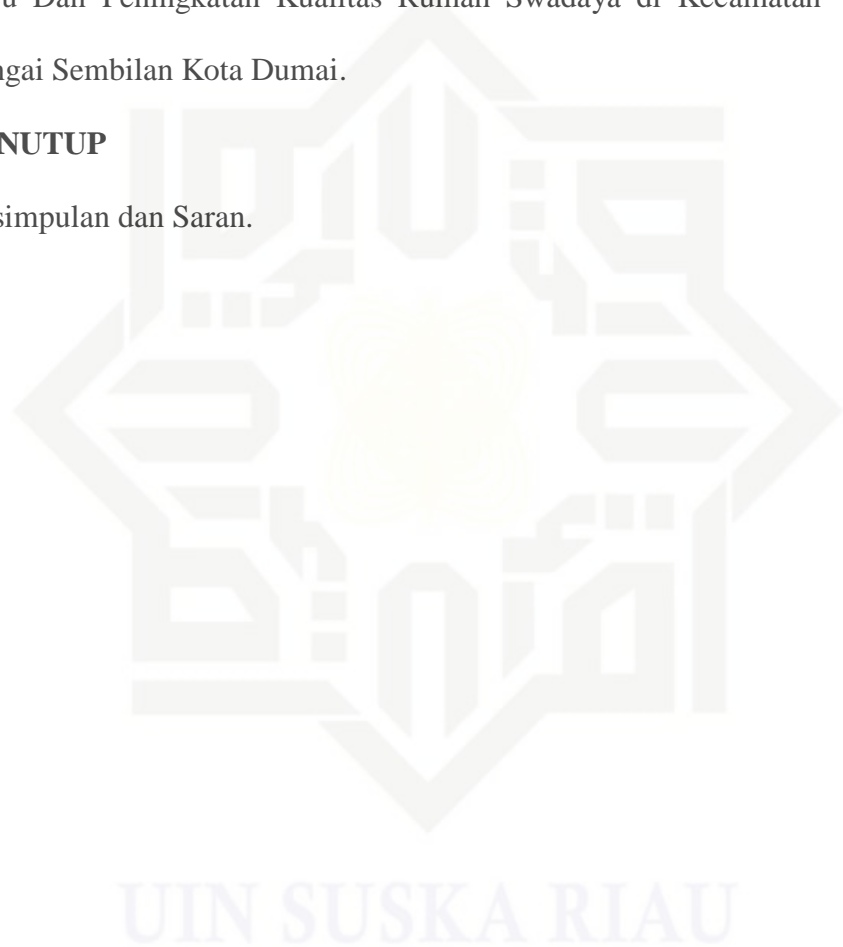
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V: PENUTUP

Dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai serta kendala dari pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Baru Dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

Kesimpulan dan Saran.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Dumai

Kota Dumai adalah sebuah kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Dumai adalah kota dengan wilayah administrasi terluas ketiga di Indonesia, setelah Kota Palangka Raya dan Kota Tidore. Kota Dumai berasal dari sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau. Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis diresmikan sebagai kota pada 20 April 1999, sebelumnya sempat menjadi kota administratif di dalam Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km². Kota Dumai terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan sebagai berikut :¹²

- 1) Kecamatan Dumai Barat
- 2) Kecamatan Dumai Timur
- 3) Kecamatan Bukit Kapur
- 4) Kecamatan Medang Kampai
- 5) Kecamatan Sungai Sembilan
- 6) Kecamatan Dumai Kota
- 7) Kecamatan Dumai Selatan

¹² Wikipedia, Kota Dumai, <https://id.m.wikipedia.org> (Diakses Pada 25 April 2021, Pukul 21.45 WIB)



B. Kecamatan Sungai Sembilan

Kecamatan Sungai Sembilan merupakan salah satu kecamatan terluas di Kota Dumai dengan luas daratan 975,38 km². Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Sembilan tahun 2018 berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik Kota Dumai sebesar 43.247 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebesar 7.333. Letak Kecamatan Sungai Sembilan tepat berada di utara Kota Dumai dengan ibukota kecamatan di Lubuk Gaung. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Sungai Sembilan memiliki batas-batas wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Rupat, Kecamatan Dumai barat dan Kecamatan Dumai Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kapur dan Kabupaten Rokan Hilir, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Sungai Sembilan terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu:¹³

- 1) Kelurahan Bangsal Aceh
 - 2) Kelurahan Lubuk Gaung
 - 3) Kelurahan Basilam Baru
 - 4) Kelurahan Batu Tritip
 - 5) Kelurahan Tanjung Penyembal
1. Luas Wilayah Kecamatan

Setelah pemekaran wilayah administrasi pemerintahan, Kecamatan Sungai Sembilan terdiri dari 5 kelurahan yang memanjang dari selatan ke utara, yaitu Bangsal Aceh, Lubuk Gaung, Tanjung Penyembal, Basilam

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Dumai, *Kecamatan Sungai Sembilan Dalam Angka*, BPS Kota Dumai, 2019, Hlm. 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baru dan Batu Teritip masing-masing dengan luas daratan 150,0 km²; 95,0 km²; 75,0 km²; 240,0 km² dan 415,38 km².¹⁴

2. Batas Wilayah Kecamatan

Letak Geografi Kecamatan Sungai Sembilan :

Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Selatan : Kecamatan Bukit Kapur dan Kabupaten Rokan Hilir

Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir

Sebelah Timur : Selat Rupat, Kecamatan Dumai Barat, dan Kecamatan Dumai Selatan.

3. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk kecamatan sungai Sembilan tahun 2018 berdsarkan proyeksi Badan Pusat Statistik Kota Dumai sebesar 43.247 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebesar 7.333. Dengan luas wilayah 975,38 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak 43.247 jiwa maka kepadatan penduduk kecamatan sungai Sembilan rata-rata 44 jiwa/km² artinya pada setiap kilometer persegi wilayah kecamatan sungai Sembilan dihuni oleh 44 orang penduduk.¹⁵

Pada tahun 2018 jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 17.305 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 15.926 jiwa. Penduduk jenis kelamin perempuan lebih sedikit dari pada penduduk jenis kelamin laki-laki. Selisihnya sebanyak 1.379 jiwa sedangkan rasio jenis kelamin

¹⁴ Ibid, Hlm. 6

¹⁵ Ibid, Hlm. 39



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar 108,66 yang berarti terdapat 109 jiwa penduduk laki-laki untuk 100 jiwa penduduk perempuan

Tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk adalah kelahiran kematian dan migrasi jumlah kelahiran penduduk di kecamatan sungai Sembilan sepanjang tahun 2018 mencapai 904 orang. Tingkat kelahiran kasar/ *Crude Birth Rate* (CBR) di kecamatan sungai Sembilan tahun 2018 sebesar 27,20 angka tersebut mengandung arti bahwa dari 1.000 orang penduduk terdapat kelahiran anak sebanyak 27 orang.

Jumlah kematian di kecamatan sungai Sembilan sepanjang tahun 2018 sebesar 271 orang. Besarnya tingkat kematian kasar/*Crude Death Rate* (CDR) adalah 8,16. Angka ini berarti bahwa pada tahun 2018 setiap 1000 orang penduduk kecamatan sungai Sembilan terdapat 8 kematian.

Migrasi dikelompokkan menjadi migrasi masuk dan migrasi keluar. Migrasi masuk menggambarkan penduduk suatu wilayah berada di wilayah domisili pada setahun terakhir. Migrasi masuk ini dapat dikatakan adalah migran baru yang masuk ke suatu wilayah administrasi. Jumlah migrasi masuk di kecamatan sungai Sembilan pada tahun 2018 sebanyak 94 orang. Migrasi keluar adalah penduduk yang keluar dengan tujuan menetap di daerah lain. Migrasi keluar di kecamatan sungai Sembilan pada tahun 2018 adalah 269 orang.¹⁶

¹⁶ Ibid, Hlm. 40



Tabel II. 1
Luas wilayah jumlah dan kepadatan penduduk

No	Kelurahan	Luas wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk per km ²
1.	Bangsar aceh	150	4703	31
2.	Lubuk gaung	95	9900	104
3.	Basilam baru	240	8919	37
4.	Batu teritip	415,38	2415	6
5.	Tanjung panyembal	75	7294	97
Jumlah		975,38	33231	34

Sumber: Badan Pusat Statistic Kota Dumai Pada Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

C. Kondisi Sosial Kecamatan Sungai Sembilan

1. Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat, pendidikan perlu di tunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas pendidikan di Kecamatan Sungai Sembilan yakni berupa Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) sejumlah 8 unit, pendidikan dasar tercatat sebanyak 20 unit Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Untuk pendidikan menengah pertama yang meliputi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kecamatan Sungai Sembilan tahun 2018 terdapat 5 unit. Sedangkan jenjang pendidikan menengah atas seperti Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta di Kecamatan Sungai Sembilan tercatat sebanyak 2 unit.¹⁷

¹⁷ Ibid, Hlm. 55



2. Kesehatan

Kesehatan adalah hak fundamental setiap individu, keluarga dan masyarakat luas. Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi warga negaranya untuk semua lapisan. Di Kecamatan Sungai Sembilan sendiri pemerintah menyediakan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Selain Puskesmas, pemerintah juga membangun 7 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 5 unit Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemerintah juga membentuk 29 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Jumlah tenaga kesehatan di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 78 orang. Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 0,002 yang mengandung arti bahwa setiap 1.000 orang penduduk di Kecamatan Sungai Sembilan hanya ada 2 tenaga kesehatan.

3. Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia, kebebasan beragama di Republik Indonesia di jamin dalam UUD 1945 dalam pasal 29 yaitu toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampuri aliran kepercayaan. Penduduk Kecamatan Sungai Sembilan sangat heterogen namun kerukunan hidup beragama nampaknya sangat terjaga dengan baik sehingga hubungan antar umat beragama terjalin dengan mesra. Fasilitas keagamaan di Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai Sembilan terdapat 34 masjid, 42 mushalla, 9 gereja, dan 1 vihara.¹⁸

D. Kondisi Ekonomi Kecamatan Sungai Sembilan

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup banyak dalam menentukan tingkat mata pencarian masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencarian masyarakat setempat khususnya Kecamatan Sungai Sembilan yang kondisi alamnya sangat mendukung untuk pertanian dan perkebunan, maka masyarakat cenderung untuk bertani dan berkebun. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan yang menjadi petani dan berkebun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan mempunyai berbagai macam usaha, hal ini sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing masyarakat, masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam seperti petani, pedagang, PNS, guru, bidan/perawat, pensiunan, buruh, jasa persewahan, TNI/POLRI, peternak, sopir tukang jahit, wiraswasta, nelayan, pertukangan dan lainnya.

E. Pemerintahan Kecamatan Sungai Sembilan

Wilayah administrasi pemerintahan kecamatan sungai Sembilan tahun 2018 terbagi dalam wilayah 5 kelurahan tidak terdapat rukun warga (RW) dan 86 rukun tetangga (RT) dengan rincian per kelurahan sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Ibid, Hlm. 56



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kelurahan Bangsak Aceh terdiri dari 10 RT.
- 2) Kelurahan Lubuk Gaung terdiri dari 25 RT.
- 3) Kelurahan Basilam Baru terdiri dari 22 RT.
- 4) Kelurahan Batu Tritip terdiri dari 11 RT.
- 5) Kelurahan Tanjung Penyembal terdiri dari 18 RT.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) kantor kecamatan dan kelurahan tahun 2018 sebanyak 97 orang. Berdasarkan golongan ASN di kecamatan sungai Sembilan terdapat 0 persen golongan I; 27,84 persen golongan II; 71,13 persen golongan III; dan 1,03 persen golongan IV.

Tabel II.2
Rincian banyak kelurahan menurut klasifikasi kelurahan di kecamatan sungai Sembilan

No	Kelurahan	Swadaya	Swakarya	Swasembada
1.	Bangsak aceh	0	0	1
2.	Lubuk gaung	0	0	1
3.	Basilam baru	0	0	1
4.	Batu tritip	0	0	1
5.	Tanjung panyembal	0	0	1
Jumlah		0	0	5

Sumber : Kantor Kelurahan

Tabel II.3
Banyaknya Rukun Tetangga Di Kecamatan Sungai Sembilan Menurut Kelurahan

No	Kelurahan	Rukun Tetangga
1.	Bangsak aceh	10
2.	Lubuk gaung	25
3.	Basilam baru	22
4.	Batu tritip	11
5.	Tanjung panyembal	18
Jumlah		86

Sumber: Kantor Kelurahan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel II.4
Jumlah Lembaga Masyarakat Kelurahan
Di Kecamatan Sungai Sembilan

No	Kelurahan	LPM	PKK
1.	Bangsar aceh	1	-
2.	Lubuk gaung	1	-
3.	Basilam baru	1	-
4.	Batu tritip	1	-
5.	Tanjung panyembal	1	-
Jumlah		5	-

Sumber: Kantor Kelurahan

Tabel II.5
Personil Keamanan Menurut Kelurahan
Di Kecamatan Sungai Sembilan

No	Kelurahan	Kamtibmas	Babinsa	Hansip
1.	Bangsar aceh	1	1	-
2.	Lubuk gaung	1	1	-
3.	Basilam baru	1	1	-
4.	Batu tritip	1	1	-
5.	Tanjung panyembal	1	1	-
Jumlah		5	5	-

Sumber: Kantor Kelurahan

UIN SUSKA RIAU

BAB III TINJAUAN TEORI

A. Negara Hukum Kesejahteraan (*welfare state*)

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) of the greatest number of their citizen. Bentham menggunakan istilah “*utility*” (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak Negara kesejahteraan” (*father of welfare state*).²⁰

Spicker berpendapat bahwa Negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada Negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Sementara Husodo menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu Negara dimana pemerintahan Negara dianggap

²⁰ Oman Sukmana, *Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Sospolvol 2 No.1 Juli-Desember 2016, Hlm. 105



bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.

Dalam garis besar, Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada Negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga Negara secara adil dan berkelanjutan.²¹

Konsep kesejahteraan (*welfare*) yang sering diartikan berbeda oleh orang dan negara yang berbeda. Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thomson (2005), Suharto (2005), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna, yaitu sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), pengertian ini biasanya menunjuk pada kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Sebagai pelayanan sosial, pada umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social service*). Sebagai tujuan sosial, diberikan kepada orang miskin. Karena

²¹ Ibid, h. 108



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut “*socialillfare*” ketimbang “*social welfare*”.

Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian kedua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).

Dalam garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang banyak mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, pertama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).²²

Dalam batang tubuh UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) serta Indonesia berdasarkan konstitusional. Jika dikaitkan dengan ruang lingkup tugas pemerintah maka filosofis konstitusional jelas dinyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip

²² Dinno Jonhadi, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Kuantan Singingi, 2014. H. 42



Negara hukum yang dinamis atau *welfare* (negara kesejahteraan), sebab negara wajib menjamin kesejahteraan sosial masyarakat. Pernyataan ini dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke Empat yang antara lain memuat empat tujuan Negara yaitu: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia, 2) mencerdaskan kehidupan bangsa, 3) melindungi kesejahteraan umum, 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²³

Paham Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya hubungan antara paham Negara hukum dan kerakyatan sehingga ada sebutan Negara hukum yang demokratis atau *democratische rechtsstaat*. Scheltema, memandang kedaulatan rakyat (*democratie beginsel*) sebagai salah satu dari empat asas Negara hukum, selain *rechtszekerheidbeginsel*, *gelijkheid beginsel*, dan *het beginsel van de dienende overheid*. Dalam kaitannya dengan Negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material Negara hukum, selain masalah kesejahteraan rakyat.²⁴

Dalam Negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara. Sesungguhnya, yang memimpin dalam penyelenggaraan Negara adalah hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip “*the*

²³ Ibid, Hlm. 52

²⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Press: Jakarta, 2015, Cet.



rule of law” and not of man”, yang sejalan dengan pengertian “nomocratie”

yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum,”*nomos*”.²⁵

B. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut pendapat para ahli yang terangkum secara konkret di bawah ini adalah penting menjadi perbandingan dari pengertian kebijaksanaan. Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah program yang terproyeksi dari cita-cita, nilai, dan praktik. Sementara itu, David Easton (1965) mendefinisikan kebijakan publik sebagai dampak dari aktivitas pemerintah. Sedangkan James Anderson (2000) mengemukakan kebijakan sebagai pelaksanaan tindakan yang relatif stabil dan digunakan untuk tujuan tertentu, diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam menghadapi masalah. James Lester dan Robert Steward (2000) memberikan definisi yang berbeda, bahwa kebijakan publik adalah sebuah proses atau serangkaian pola aktivitas atau keputusan pemerintah yang didesain untuk menyembuhkan masalah publik, baik nyata imajiner.²⁶

Dari berbagai penjelasan tersebut menunjukkan, bahwa kebijakan publik mempunyai implikasi terhadap masyarakat. Secara konkret, bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Di samping itu, kebijakan publik mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk kepentingan masyarakat.

²⁵ Ibid, Hln. 88

²⁶ Suratman, dkk, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2019. Cet-1, Hlm. 155



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam kegiatan mencapai suatu tujuan haruslah mempertimbangkan efisiensi. Keinginan, ataupun tujuan yang ditetapkan dalam bentuk yang bermacam-macam harus dicapai dengan kegiatan-kegiatan administrasi secara efisien di dalam pemerintahan, itulah yang dimaksud dengan *public policy*. Jadi *public policy* itu merupakan hasil dari kegiatan politik, sedangkan untuk terealisasinya *public policy* tersebut diperlukan kegiatan administrasi, dalam hal ini administrasi negara.

Dalam melaksanakan suatu *public policy*, yaitu mencapai tujuan yang ditetapkan itu tidaklah selalu lancar, yaitu banyak halangan dan rintangan serta “issue” yang timbul, maka pelaksanaannya (*implementation*), yaitu yang disebutkan dengan kegiatan administrasi, juga akan menghadapi hal-hal atau masalah-masalah yang perlu diatasi.²⁷

Dalam perkembangannya, hukum tidak hanya dipergunakan untuk mengatur perilaku yang ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada, melainkan lebih dari itu, hukum digunakan pula sebagai suatu sarana. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditentukan agar dapat terwujud didalam masyarakat diperlukan adanya beberapa sarana. Salah satu sarana yang cukup memadai adalah hukum dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.

Pembangunan menghendaki agar masyarakat bertindak menurut cara-cara yang baru. Kehadiran hukum di dalam masyarakat yang sedang membangun merupakan proses yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk

²⁷ Ibid, h. 156



menjadikan sebagai sarana yang bisa menjalankan perannya dengan lebih efektif. Oleh karena itu, perubahan-perubahan besar yang terjadi di dalam hukum ataupun di dalam masyarakat diharapkan terjadi sebagai konsekuensi logis dari pembangunan.

Apabila pembangunan kita lihat sebagai proses berlangsungnya perubahan-perubahan, dan hukum dijadikan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mengadakan perubahan di dalam masyarakat, maka semakin penting peran hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat untuk merealisasikan kebijaksanaan pemerintah. Seidman menyatakan, bahwa pembuat kebijaksanaan hanya mempunyai satu alat yang dapat ia pakai untuk mempengaruhi aktivitas pemegang peran, yaitu peraturan-peraturan yang ia buat, hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dan sebagai peraturan perundang-undangan telah membuktikan, bahwa ia merupakan salah satu alat untuk melaksanakan kebijaksanaan. Dalam kaitan ini, Hans Kelsen mengajarkan bahwa peraturan-peraturan yang diundangkan oleh kekuasaan perundang-undangan di dalam suatu Negara modern mempunyai aspek ganda, yaitu: 1) bahwa peraturan hukum itu tertuju kepada warga Negara dan mengarahkannya agar berbuat menurut cara-cara tertentu, 2) bahwa peraturan-peraturan itu sekaligus juga ditujukan kepada para hakim agar menerapkan sanksi, manakala ada warga Negara melanggar peraturan.²⁸

²⁸ Ibid, h. 162



Penggunaan hukum sebagai sarana ini dikarenakan hukum memiliki

beberapa kelebihan, yaitu hukum bersifat rasional, integratif, memiliki legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan, dan memiliki sanksi. Dalam kaitannya dengan pembicaraan tentang hukum sebagai sarana kebijaksanaan publik, muncul permasalahan bahwa hukum yang diharapkan dapat berperan dalam pembangunan itu masih harus dibangun, masih harus diperbaharui. Dalam kaitan ini, Prof. Peters melihat adanya gejala-gejala satu sama lain saling berakaitan, yaitu keabsahan hukum yang cenderung goyah, efektivitas hukum yang melemah, dan bobot hukum yang merosot. Masalah keabsahan hukum muncul dalam dua relasi, yaitu:²⁹

1. Dalam hubungannya dengan pemerintah dan pendukungnya dimana pemerintah harus menampilkan citra tertentu dalam bentuk perundang-undangan dan ketetapan-ketetapan yang merumuskan kebijaksanaan untuk memikat kelompok-kelompok pendukung tersebut.
2. Menyambut tantangan terhadap perundang-undangan tersebut oleh kelompok-kelompok lawan politik dan organisasi-organisasi masyarakat yang dapat menjadi korban hukum. Untuk menghadapi terjadinya konsesi-konsesi terhadap radikalisme undang-undang dan cara-cara pengendalian sarana untuk mencapai sasaran kebijaksanaan.

Dikursus mengenai hukum dan kebijakan publik tentunya memang tidak terlepas dari persoalan Negara dan pemerintahan serta dinamika tata pengolahannya. Output dari tata kelola tersebut mengkristal berupa produk

²⁹ *Ibid*, h. 163



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dan kebijakan publik yang acapkali tidak berpihak terhadap kepentingan publik justru sebaliknya keberpihakan tersebut didesain untuk kepentingan golongan maupun kelompok tertentu. Idealnya Negara memang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kesejahteraan kepada warganya secara komperhensif, universal, dan non diskriminasi.³⁰

Ketika ditelaah secara mendalam akar makna dari Negara yang menerbitkan sekumpulan aturan maupun segudang kebijakan, masih merupakan suatu pengertian yang abstrak, akan tetapi pemerintah itu sendiri adalah sesuatu yang konkret. Sedangkan yang bertindak atau yang melakukan perbuatan hukum adalah pemerintah, adapun Negara sekedar dipandang sebagai wadah, tepat menyelenggarakan pemerintahan. Secara yuridis, terdapat perbedaan yang tegas antara Negara dan pemerintah, Negara adalah sebuah badan (*lichaam body*), sedangkan pemerintah adalah alat kelengkapan Negara (*orgaan*). Bagir Manan mendefinisikannya: “dalam situasi yang konkrit dan sehari-hari, hampir tidak pernah dibedakan antara Negara dan pemerintah. Kedua istilah tersebut sering dipergunakan secara silih berganti (*interchangeable*) tanpa diperhatikan dan disadari perbedaannya”.³¹

Secara garis besar kebijakan publik diklasifikasikan dalam empat hal. Pertama, definisi kebijakan publik dalam lapis pemaknaan sebagai proses *decision making* (pengambilan keputusan). Kedua, kebijakan publik sebagai sebuah managerial. Didalamnya kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian kerja pejabat publik dalam membuat dan menerapkan sebuah kebijakan.

³⁰ Luthfi J. Kurniawan, *Hukum Dan Kebijakan Publik (Perihal Negara, Masyarakat Sipil Dan Kearifan Lokal Dalam Perspektif Politik Kesejahteraan)*, Setara Pers, Malang, 2016, Hlm. 2

³¹ *Ibid*, h. 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, definisi kebijakan publik yang dikategorikan sebagai bentuk intervensi pemerintah. Kebijakan publik dikategorikan sebagai bentuk kerja sistem sosial dalam suatu masyarakat. Keempat, pendefinisian kebijakan publik yang masuk dalam lapis pemaknaan interaksi antara Negara dan rakyatnya.

Pemahaman umum tentang kebijakan publik (*public policy*), paling tidak berkisar pada tiga hal penting, yaitu: perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Pilihan keputusan kebijakan tersebut sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Secara lebih sederhana kebijakan publik dapat dipahami sebagai jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Dalam konteks Indonesia, cita-cita dan tujuan Negara adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Atau dengan kata lain kebijakan publik adalah suatu “manajemen pencapaian tujuan nasional”.³²

³² Ibid, h. 16-17



C. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan, bertujuan mempercepat pengurangan kemiskinan serta peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan pemerintah dalam menangkal dan menanggulangi kemiskinan, melalui pengembangan institusi lokal, pengembangan kapasitas dan pengembangan kewirausahaan baik secara individu maupun komunitas terorganisasi.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang harus ditangani secara terpadu karena kemiskinan merupakan persoalan struktural dan mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, asset dan lain-lain. Penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat termasuk masyarakat miskin itu sendiri.

Implementasi kebijakan dapat dilakukan melalui pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Dalam pendekatan *top-down*, implementasi kebijakan dilakukan secara tersentralisasi dan dimulai dari actor pemerintah tingkat atas serta keputusan penetapan kebijakan publik oleh pemerintah tingkat atas. Pelaku kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut sesuai prosedur dan tujuan yang telah digariskan oleh pembuat kebijakan dari pemerintah tingkat atas. Dalam pendekatan *bottom-up*, dimana pelaksanaan kebijakan yang terformulasi dari inisiasi warga masyarakat setempat. Hal ini berkaitan bahwa, masalah yang terjadi pada level

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tingkat bawah dan masyarakat secara substansial hanya diketahui, dimengerti dan dipahami secara baik oleh warga masyarakat itu sendiri. Argumentasi yang di sampaikan bahwa masalah dan persoalan yang terjadi pada level daerah dan desa hanya dapat dimengerti dan dipahami secara baik dan benar oleh warga masyarakat setempat.³³

Kebijakan pelayanan publik untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan bukan hal baru di Indonesia ini. Masalah itu telah menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan pemerintah colonial Belanda yang dikenal politik etis. Cukup lama Indonesia berjuang melawan kemiskinan, namun hingga sekarang usaha itu tidak berkelanjutan dan masih banyak rakyat Indonesia masih terkurung dalam kemiskinan. Banyak program pengentasan kemiskinan dilakukan pemerintah namun berhasil. Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal.³⁴

Pemerintah berperan penting dalam setiap usaha pemberdayaan masyarakat miskin, termasuk dalam kebijakan public, yakni memberikan layanan pada masyarakat miskin. Kewajiban pemerintah atau Negara dalam memberikan layanan pada masyarakat telah dimuat dalam Undang-undang RI No. 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik yang menyatakan Negara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Kiagus Muhammad Faisal, Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan, Volume 1 Nomor 2 Maret 2019, H. 3-7

³⁴ Rulam Ahmadi, Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 10 No. 2 Desember 2012, H. 17-18



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD 1945. Dalam UUD 1945 dan amandemennya pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 dikemukakan: pasal 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara; pasal 2, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; pasal 3, pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan demikian ahwa layanan publik bidang pemberdayaan masyarakat miskin memiliki daya dukung formal, yakni UUD 1945 yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin didukung banyak kajian teoritik. Teori atau konsep yang menjelaskan pemerintah memiliki peran menentukan atas keberhasilan usaha-usaha pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pemerintah memberikan layanan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan persoalan dan harapan mereka. Peran pemerintah cukup beragam dan rumit karena masalah kemiskinan bersifat multidimensional. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat juga bersifat multidimensional. Godinot mengatakan kemiskinan yang ekstrim mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan akibatnya kebijakan dan komprehensif dibutuhkan untuk memeranginya.³⁵

³⁵ Ibid, Hlm. 24



D. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta PSU. Konsep dari bantuan ini adalah program strategis nasional, berbasis pada pemberdayaan masyarakat, penanganan RTLH dan *backlog*, stimulan untuk replikasi program serupa, mendukung penanganan kumuh, mendukung program PADAT KARYA TUNAI (PKT).

Kemudian prinsip dari bantuan stimulan perumahan swadaya ini adalah:

- 1) Bantuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat;
- 2) Masyarakat pelaku utama;
- 3) Pengungkit keswadayaan masyarakat;
- 4) Gotong royong dan berkelanjutan;
- 5) Fasilitator pendamping masyarakat;
- 6) Tanpa pungutan biaya;
- 7) Output rumah layak dan ter huni;
- 8) Dilaksanakan ditahun anggaran berjalan;
- 9) Tepat sasaran, prosedur, waktu, pemanfaatan dan akuntabel.

Bantuan stimulan perumahan swadaya berupa uang dan barang, besaran dana bantuan BSPS adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Cipta Milik UIN Suska Riau
 Syarif Ismail
 UIN Suska Riau



Jenis Bantuan	Pemanfaatan bantuan			Keterangan
	Bahan bangunan	Upah kerja	Total	
Peningkatan kualitas (PK)	Rp. 12.500.000,-	Rp. 2.500.000,-	Rp. 15.000.000,-	Regular
	Rp. 25.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	Khusus wilayah pesisir dan pegunungan di provinsi papua barat
Pembangunan baru (PB)	Rp. 25.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	Regular
	Rp. 50.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 60.000.000,-	Khusus provinsi papua dan papua barat
	Rp. 40.000.000,-	Rp. 20.000.000,-	Rp. 60.000.000,-	Khusus kab. Asmat Prov. Papua

Kemudian kriteria penerima bantuan stimulan perumahan swadaya adalah:³⁶

- Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga
- Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah
- Belum memiliki rumah atau memiliki rumah dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni
- Belum pernah memperoleh BPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan
- Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi
- Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.

Bantuan stimulan perumahan swadaya (BPS) pada hakekatnya adalah program nasional yang dijalankan oleh semua kalangan untuk

³⁶ Simantu, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, <https://simantu.pu.go.id>, (Diakses Pada 29 April 2021, Pukul 20:30 WIB)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggulangi masalah memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal sehingga dapat memenuhi tempat tinggal dengan layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Tujuan bantuan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Sedangkan perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Standar layak huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas dan kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah.³⁷

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun nonteknis. Persyaratan tersebut terdiri dari 9 kriteria khusus. Rumah tidak layak huni selalu berkaitan dengan aspek kemiskinan karena keterjangkauan daya beli masyarakatnya terhadap rumah. Adapun 9 kriteria khusus yang dikatakan sebagai rumah tidak layak huni, yaitu:³⁸

³⁷ Meyer Imanuel, Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kabupaten Minahasa Selatan, (*ejournal.unsrat.ac.id*), Hlm. 4

³⁸ Khor, Skripsi: "Analisis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011 Di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas" (Riau: UIN Suska, 2013), Hlm. 18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Luas lantai per kapita kota kurang dari empat meter persegi (4 m²), desa kurang dari 10 m².
- 2) Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas.
- 3) Tidak ada akses MCK.
- 4) Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, papan, rumbia.
- 5) Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara.
- 6) Tidak memiliki pembagia ruangan.
- 7) Lantai dari papan bahan tidak permanen ataupun lantai dari tanah.
- 8) Letak rumah tidak teratur dan berdenpetan.
- 9) Kondisi rusak, ditambah lagi dengan saluran pembuangan air yang tidak memenuhi standar.

Menurut Depkes RI, rumah harus memnuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat, yaitu:

- a. Dapat memenuhi kebutuhan fisiologi antara lain pencahayaan, pengahawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu.
- b. Dapat memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privacy yang cukup, komunikasi yang sehat antara anggota keluarga dan penghuni rumah.
- c. Memnuhi persyaratan pencegahan penularan pneyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas dari penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan

dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penggawaab yang cukup.

d. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun keadaan dalam rumah, antara lain: posisi garis sepadan jalan, kontruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sudah berjalan dengan baik, dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima bantuan. Namun penetapan penerima bantuan belum merata, sehingga masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan sedangkan rumah tempat tinggalnya sudah banyak kerusakan dan layak untuk di bantu. Bahkan ada satu kelurahan yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali dikarenakan jarak dan ketersediaan bahan bangunan. Tentunya hal ini kedepannya harus bisa di atasi oleh pemerintah demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Beberapa kendala dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya yaitu, kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam hal dinas perumahan dan permukiman dalam pembangunan rumah, sehingga terdapat rumah yang telah mendapat bantuan namun belum ada perbaikan seperti yang diharapkan dan juga bahan bangunan yang digunakan tidak sesuai dengan yang di sarankan oleh pemerintah, ketersediaan sarana dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prasana, Kendala selanjutnya adalah jarak dengan infrastruktur jalan yang kurang memadai dan penyediaan bahan bangunan yang jauh dari lokasi penetapan bantuan, kemudian cuaca yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian bangunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis ingin memberikan beberapa saran yang kiranya dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Untuk tim pelaksana atau pengawas yang telah ditentukan perlu adanya pengawasan lebih dalam proses pembangunan dan pembelian bahan bangunan, agar sesuai dengan yang disarankan. Dan kesiapan bangunan juga sesuai dengan rancangan awal. Sehingga tidak ada lagi MBR yang mendapat bantuan yang rumahnya belum selesai dibangun dan dana yang diberikan bisa dicukupkan untuk pembangunan bukan untuk keperluan yang lain.
2. Untuk ketua RT dan Kepala kelurahan, perlu adanya evaluasi kinerja dalam memahami program-program yang diberikan pemerintah, terutama dalam pendataan MBR yang memenuhi syarat, sehingga pembagian bantuan bisa merata. Dan juga masyarakat paham dengan sistem bantuan secara swadaya.
3. Untuk masyarakat kecamatan sungai Sembilan secara keseluruhan, diharapkan dapat bekerjasama dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan dari bantuan stimulan perumahan swadaya.



DAFTAR PUSTAKA

Andi Pangerang Moenta Dan Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018

Badan Pusat Statistik Kota Dumai, Kecamatan Sungai Sembilan Dalam Angka, BPS Kota Dumai, 2019

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003

Dinno Jonhadi, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Kuantan Singingi, 2014

Ida Farida, Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS), Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 7 Nomor 1 April 2020

Khori, Skripsi: “Analisis Pelaksanaan Bantuan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2011 Di Desa Teluk Siantan Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas” (Riau: UIN Suska, 2013)

Kiagus Muhammad Faisal, Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan, Volume 1 Nomor 2 Maret 2019

Luthfi J. Kurniawan, *Hukum Dan Kebijakan Publik (Perihal Negara, Masyarakat Sipil Dan Kearifan Lokal Dalam Perspektif Politik Kesejahteraan)*, Setara Pers, Malang, 2016

Meyer Imanuel, Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kabupaten Minahasa Selatan, (ejournal.unsrat.ac.id),

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonnesia*, Rajawali Press: Jakarta, 2015

Oman Sukmana, Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Jurnal Sospolvol 2 No.1 Juli-Desember 2016

Rulam Ahmadi, Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 10 No. 2 Desember 2012

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Simantu, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, <https://simantu.pu.go.id>

Sri Edi Suwarsono, *Sekitar Kemiskinan Dan Keadilan*, (Jakarta: UII Press, 2007)

Hak Cipta dilindungi undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© 2013 Universitas Jember
Jember, Indonesia

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan mem-

1. **W**arung mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. **D**ilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10152/2019
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Desember 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rizki kurniawan
NIM : 11627104227
Jurusan : Ilmu Hukum SI
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Untuk Masyarakat Miskin
Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Mekanisme
Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Baru Dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
studi kasus Di Kecamatan Sungai Sembilan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rector
Dean
Dr. H. Hajar., M.Ag.
19580712 198603 7005

mbusan :
ktor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email: admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RIZKI KURNIAWAN

NIM : 11627104227

JURUSAN : JURUSAN ILMU HUKUM

JUDUL : PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
07/PRT/M/2018 TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN
SWADAYA DI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

Pembimbing: Dr. Abu Samah, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Juli 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH. CPL
NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul : **PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/PRT/M/2018 TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI**, ditulis oleh saudara :

Nama : RIZKI KURNIAWAN
NIM : 11627104227
Program Studi : ILMU HUKUM
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : KAMIS/19 DESEMBER 2019
Narasumber : LOVELLY DWINA DAHEN, SH., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 30 April 2021
Narasumber

Lovelly Dwina Dahen, SH., MH
NIP. 19820622 201101 2 006

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/29193
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : n.04/F.I/PP.00.9/10152/2019 Tanggal 26 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | RIZKI KURNIAWAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11627104227 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN RUMAH UNTUK MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KELURAHAN SE KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI
2. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

Jalan Puteri Tujuh Nomor 9, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur

DUMAI - RIAU

REKOMENDASI

Nomor : 134.071/IV/2020/108

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, setelah membaca surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pekanbaru Nomor : 503/DPMTSP/NON-IZIN-RISET/29193 tanggal 26 Desember 2019 perihal rekomendasi penelitian, dengan ini memberikan Rekomendasi yang dimaksud kepada :

Nama : **RIZKI KURNIAWAN**
 Nomor Mahasiswa : 11627104227
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Jenjang : S.1
 Alamat : Jl. Teladan gg. Nurul Iman No. 24, Dumai - Riau
 HP. 0823-9031-9533

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Kelurahan Se Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Dumai guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Skripsi dengan Judul :

**" PELAKSANAAN BANTUAN STIMULASI PEMBANGUNAN RUMAH UNTUK
MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 27
TAHUN 2018 TENTANG MEKANISME PENYALURAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN
BARU DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA (STUDI KASUS DI
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN) "**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 3 (tiga) Bulan terhitung mulai tanggal 06 April s/d 06 Juli 2020.
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

- Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.